

**MANAJEMEN BENCANA OLEH BADAN PENANGGULANGAN
BENCANA DAERAH (BPBD) DALAM MENANGGULANGI BANJIR
DI KOTA SEMARANG**

Dio Mahardika, Endang Larasati

Departemen Administrasi Publik

Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Diponegoro

Jl. Prof. H. Soedarto, S.H Tembalang Semarang Kotak Pos 1269

Telepon (024) 7465407 Faksimile (024) 7465405

Laman: <http://fisip.undip.ac.id> email: fisip@undip.ac.id

ABSTRACT

The most frequent disaster in many city of Indonesia is flood disaster, so disaster management is required to minimize the risks caused by floods. This study focuses on disaster management conducted by the Regional Disaster Management Agency (BPBD) Semarang City, whether it is in accordance with the stages of disaster management that is pre-disaster, during the disaster, and post disaster. So this research is to find out how the disaster management conducted by Regional Disaster Management Agency (BPBD) Semarang City in handling the flood disaster.

The research method used in this research is qualitative method of descriptive type, with staff as an informant from Regional Disaster Management Agency (BPBD) Semarang City which has duty to conduct disaster management in Semarang City. This research explains about how disaster management conducted by BPBD in tackling flood disaster in Semarang City is in accordance with disaster management theory or not yet.

The results showed that the stages of disaster management carried out BPBD Semarang City is starting from pre-disaster that there are still shortcomings that is not the formation of contingency plans, then in the stage when there is a disaster that is lack of logistics and disaster emergency personnel, and the last stage is post-disaster there are still shortcomings where the form of rehabilitation conducted BPBD there are still less appropriate target.

Keyword: stages of disaster management, Semarang city's BPBD, handling floods in Semarang

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Kondisi geografis daerah kota dan kabupaten di Indonesia yang beragam mulai dari suatu daerah yang terletak di dataran tinggi, dataran rendah, namun juga ada suatu daerah yang memiliki dataran rendah dan juga dataran tinggi. Kondisi tersebut yang menyebabkan Indonesia merupakan salah satu negara yang mempunyai potensi bencana alam yang tinggi. Bencana alam yang sering terjadi di Indonesia seperti gunung meletus, banjir dan rob, tanah longsor, gempa bumi, hingga yang paling ekstrem adalah gelombang tsunami.

Potensi penyebab bencana di Indonesia dapat dikelompokkan dalam 3 (tiga) golongan yaitu karena faktor alam, perbuatan manusia, dan sosial. Bencana alam antara lain berupa gempa bumi, letusan gunung api, angin topan, tanah longsor, kekeringan kebakaran hutan/lahan karena faktor alam, hama penyakit tanaman, epidemi wabah, kejadian luar biasa, dan kejadian antariksa/benda-benda angkasa. Bencana buatan manusia antara lain berupa kebakaran hutan/lahan yang

disebabkan oleh manusia, kecelakaan transportasi, dampak industri, bom nuklir, pencemaran lingkungan seperti polusi udara, polusi air sungai, dan lain sebagainya. Bencana sosial terjadi karena rusak dan kurang harmonisnya hubungan antar sosial antar anggota masyarakat yang disebabkan berbagai faktor baik sosial, budaya, suku atau ketimpangan sosial.

Bencana alam yang sering sekali melanda banyak daerah di Indonesia yaitu banjir. Banjir merupakan bencana alam yang sudah menjadi hal biasa bagi masyarakat Indonesia, khususnya bagi mereka masyarakat di kota yang berada di pesisir pantai. Kota yang berada di pesisir pantai biasanya kerap sekali terjadi bencana banjir. Hal ini disebabkan karena dua hal yaitu antara perbuatan manusia atau memang benar-benar merupakan bencana dari alam. Banjir yang atas perbuatan manusia adalah akibat dari ulah masyarakat yang tidak bisa menjaga lingkungannya dengan baik. Sebagai contoh adalah kebiasaan masyarakat yang membuang sampah ke sungai, hal ini yang ternyata masih kurang diperhatikan oleh masyarakat bahwa mereka belum paham mengenai akibat dari kebiasaan mereka

jika membuang sampah ke sungai. Lalu banjir yang benar-benar merupakan bencana alam contohnya adalah, curah hujan yang sangat tinggi dan juga dalam kurun waktu yang lama, sehingga mengakibatkan debit air sungai meningkat tinggi dan juga sistem drainase yang tidak dapat menampung derasnya air hujan yang turun, sehingga mengakibatkan banjir di suatu daerah. Bencana alam dapat terjadi di mana saja, termasuk di kota besar seperti kota Semarang. Kota Semarang memiliki letak geografis yang menarik yaitu memiliki gunung sekaligus memiliki pantai, hal ini sangat jarang sekali ditemukan oleh kota-kota lain di Indonesia.

Selama lima tahun terakhir bencana banjir selalu hadir di Kota Semarang. Baik banjir akibat genangan air yang diakibatkan oleh air hujan, maupun banjir akibat meluapnya air laut atau yang lebih khususnya disebut banjir rob. Di dalam catatan sejarah Semarang tidak pernah lepas dari ancaman banjir. Penyebab banjir di Semarang pun beragam. Mulai dari tingginya volume air pasang di Laut Jawa, lalu kenaikan permukaan air laut yang merupakan dampak dari pemanasan global (*global*

warming) dan juga adanya penurunan permukaan tanah (*land subsidence*), selain itu juga permasalahan yang klasik yaitu membuang sampah di sungai dan selokan, dan juga sistem drainase yang kurang baik.

Bencana banjir yang terjadi di Semarang tiap tahunnya ini merupakan salah satu permasalahan utama yang dihadapi oleh warga Semarang dan juga Pemerintah Kota Semarang. Akibat dari bencana banjir inilah yang merugikan masyarakat Semarang baik dari sisi materiil dan psikologis. Secara materiil warga yang terkena bencana banjir tiap tahunnya harus kehilangan harta bendanya, dan secara psikologis akan berdampak juga pada masyarakat. Dampak psikologis ini yang membuat pikiran dan hidup warga yang sering terkena bencana banjir menjadi tidak tenang. Karena setiap kali hujan deras dalam waktu yang lama, mereka pun was-was terhadap akibat dari hujan apakah akan datang banjir atau tidak. Ketidaktenangan perasaan warga inilah yang merugikan mereka, karena warga juga berhak mendapat ketenangan dalam hidupnya.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana manajemen bencana yang dilakukan oleh BPBD Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir?
2. Apa faktor penghambat dan pendukung dalam manajemen bencana BPBD Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir?

C. Tujuan

1. Untuk mengetahui manajemen bencana BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan banjir.
2. Untuk mengetahui apa saja yang menjadi faktor penghambat dan pendukung BPBD Kota Semarang dalam penanggulangan manajemen bencana banjir di Semarang.

D. Kajian Teori

D.1 Manajemen Bencana

Tahapan Manajemen Bencana

Manajemen bencana merupakan suatu proses terencana yang dilakukan untuk mengelola bencana dengan baik dan aman melalui 3 (tiga) tahapan sebagai berikut:

1) Pra Bencana

Tahapan pra bencana ini merupakan tahapan manajemen bencana pada kondisi sebelum kejadian atau pra bencana meliputi kesiagaan, peringatan dini, dan mitigasi.

1. Kesiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna. Membangun kesiagaan adalah unsur penting, namun tidak mudah dilakukan karena menyangkut sikap mental dan budaya serta disiplin di teman masyarakat. Kesiagaan adalah tahapan yang paling strategis karena sangat menentukan ketahanan anggota masyarakat dalam menghadapi datangnya suatu bencana.
2. Peringatan dini, langkah ini diperlukan untuk memberi peringatan kepada masyarakat tentang bencana yang akan terjadi sebelum kejadian seperti banjir, gempa bumi, tsunami, letusan gunung api atau badai terjadi.
3. Mitigasi bencana adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan

peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana. Mitigasi bencana adalah upaya untuk mencegah atau mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat suatu bencana, sehingga jelas bahwa mitigasi bersifat pencegahan sebelum kejadian.

2) Saat Kejadian Bencana

Saat peringatan dini ataupun tanpa peringatan sekalipun namun bencana tetap terjadi maka di situlah diperlukan langkah-langkah seperti tanggap darurat untuk dapat mengatasi dampak bencana dengan cepat dan tepat agar jumlah korban atau kerugian dapat diminimalkan.

1. Tanggap Darurat:

Tanggap darurat bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.

Tanggap darurat adalah tindakan segera yang dilakukan untuk mengatasi kejadian bencana.

Tindakan ini dilakukan oleh tim penanggulangan yang dibentuk di masing-masing daerah atau organisasi. Dalam hal ini Pemerintah Kota Semarang memiliki Badan Penanggulangan Bencana (BPBD). Langkah-langkah yang harus dilakukan dalam kondisi tanggap darurat antara lain:

- a) Pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, sehingga dapat diketahui dan diperkirakan magnitude bencana, luas area yang terkena dan diperkirakan tingkat kerusakannya
- b) Penentuan status keadaan darurat bencana
- c) Berdasarkan penilaian awal dapat diperkirakan tingkat bencana sehingga dapat pula ditentukan status keadaan darurat. Jika tingkat bencana sangat besar dan berdampak luas, mungkin bencana tersebut dapat digolongkan sebagai bencana nasional
- d) Penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana

Langkah selanjutnya adalah melakukan penyelamatan dan evakuasi korban bencana yaitu:

- 1) Pemenuhan kebutuhan dasar seperti sandang, pangan papan
- 2) Perlindungan terhadap kelompok rentan, yaitu anak-anak, orang tua, wanita, pasien rumah sakit, dan warga yang dianggap lemah lainnya
- 3) Pemulihan dengan segera sarana dan prasarana vital seperti saluran telepon, jaringan listrik, air minum, akses jalan.

2. Penanggulangan Bencana:

Selama kegiatan tanggap darurat, upaya yang dilakukan adalah menanggulangi bencana yang terjadi sesuai dengan sifat dan jenisnya. Penanggulangan bencana memerlukan keahlian dan pendekatan khusus menurut kognisi dan skala kejadian. Tim tanggap darurat diharapkan mampu menangani segala bentuk bencana. Oleh karena itu tim tanggap darurat harus diorganisir dan dirancang untuk dapat menangani berbagai jenis bencana.

3) Pasca Bencana

Setelah bencana terjadi dan setelah proses tanggap darurat dilewati, maka langkah berikutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi.

1. Rehabilitasi:

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana. Di tingkat industri atau perusahaan, fase rehabilitasi dilakukan untuk mengembalikan jalannya operasi perusahaan seperti sebelum terjadi bencana terjadi. Upaya rehabilitasi misalnya memperbaiki peralatan yang rusak dan memulihkan jalannya perusahaan seperti semula.

2. Rekonstruksi:

Rekonstruksi adalah pembangunan kembali semua sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah

pasca-bencana baik pada tingkat pemerintahan maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala kegiatan aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah pasca-bencana. Proses rekonstruksi tidak mudah dan memerlukan upaya keras dan terencana dan peran serta semua anggota masyarakat.

E. Metode

Desain Penelitian

Penelitian ini menggunakan tipe penelitian kualitatif pendekatan deskriptif. Data yang diperoleh bersumber dari data primer hasil wawancara dan data sekunder dari kepustakaan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Semarang. Teknik pemilihan informan menggunakan teknik purposive sampling, dimana peneliti menentukan sendiri informan kunci dan informan biasa dengan alasan subyek telah cukup

lama dan intensif menyatu dengan kegiatan atau medan aktifitas yang menjadi informasi.

Analisis penelitian Tahapan analisis data yang diperoleh dilakukan mulai dari Pengumpulan Data; Reduksi Data yakni merangkum dan memilih hal-hal yang pokok; Uji Keabsahan data; Penyajian Data hasil penelitian; Penarikan Kesimpulan. Analisis data dilapangan dilakukan menggunakan analisis Spradley dalam Sugiyono (2016: 354-362) yakni analisis domain dan taksonomi.

Kualitas Data

Pengujian keabsahan dalam penelitian ini menggunakan Teknik Triangulasi Sumber yakni uji validitas dengan cara mengecek data yang diperoleh dari sumber yang berbeda. Data wawancara dari satu narasumber di cek kembali dengan data hasil wawancara dengan sumber lain

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. Manajemen Bencana oleh BPBD Semarang dalam menanggulangi bencana banjir

A.1 Tahap Pra Bencana

Mitigasi

Mitigasi merupakan salah satu dari tahapan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dimana merupakan tahapan yang pertama dilakukan. Pada tahap pra-bencana mitigasi ini adalah tugas yang dilakukan oleh Bidang I yaitu Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Sesuai dengan tahapan pra-bencana yaitu mitigasi, maka dapat dilihat dengan program dan kegiatan yang dilakukan oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan BPBD Kota Semarang adalah yaitu: Membentuk kelurahan siaga bencana dan kelurahan tangguh bencana Dalam rangka mengurangi risiko dampak bencana banjir yang terjadi, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang membentuk Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana. Pembentukan KSB dan KTB ini merupakan langkah yang diambil oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan bertujuan untuk mempersiapkan

masyarakat yang berada di daerah rawan akan bencana banjir agar dapat mengantisipasi apabila terjadi banjir.

Pembentukan Kelurahan Siaga Bencana (KSB) dan Kelurahan Tangguh Bencana (KTB) di Kota Semarang tersebut melibatkan banyak pihak yaitu warga masyarakat, Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, Aparatur Sipil Negara tingkat Kelurahan, Ketua RT/RW, dan juga pihak terkait seperti relawan-relawan bencana, dan juga Organisasi Non Pemerintah. Semuanya saling terkait satu sama lain dalam rangka untuk mencegah terjadinya banjir atau paling tidak mengurangi dampak yang ditimbulkan akibat banjir di suatu kelurahan berbasis masyarakat setempat. Jumlah Kelurahan Siaga Bencana di Kota Semarang ada 35, namun Kelurahan Siaga Bencana yang memiliki karakter bencana banjir ada 15 kelurahan.

Pembentukan KSB dan KTB tersebut merupakan perwujudan langkah manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam

menerapkan program pr-bencana untuk menghadapi bencana banjir yang sering melanda Kota Semarang. Melalui sosialisasi yang rutin dilakukan oleh BPBD kepada KSB dan KTB, agar dapat berperan optimal dalam menghadapi bencana banjir.

Kesiapsiagaan

1. Rencana Kontigensi

Rencana Kontigensi adalah suatu proses perencanaan ke depan, dalam situasi terdapat potensi bencana, di mana skenario dan tujuan disepakati, tindakan teknis dan manajerial ditetapkan, dan sistem tanggapan dan pengarahan potensi disetujui bersama, untuk mencegah atau menanggulangi secara baik dalam situasi darurat atau kritis. Tujuan adanya dokumen rencana kontigensi adalah sebagai dasar memobilisasi sumber daya para pemangku kepentingan pada saat tanggap darurat bencana dalam melakukan penanggulangan bencana yang cepat dan efektif.

2. Membuat peta rawan dan risiko bencana

Peta rawan bencana dan peta risiko bencana merupakan salah satu program yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam rangka untuk menghadapi kemungkinan terjadinya banjir di suatu wilayah. Peta rawan bencana sendiri merupakan peta yang dibuat dengan tujuan agar memetakan wilayah atau daerah mana saja yang rawan dan memungkinkan terdampak banjir suatu waktu. Sedangkan peta risiko bencana lebih detail dibandingkan peta rawan bencana.

Peringatan Dini

Bentuk peringatan dini dalam pencegahan dan kesiapsiagaan yang selanjutnya dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah dengan membuat sistem peringatan banjir di daerah-daerah yang dekat dengan sungai. Sistem peringatan yang sudah dibangun oleh Bidang I Pencegahan dan Kesiapsiagaan belum menggunakan sistem yang modern. Masih mengandalkan cara tradisional seperti masih menggunakan pengamatan secara langsung ke sungai oleh petugas atau relawan, dan juga peralatan yang

digunakan masih sederhana seperti masih menggunakan pengukur tinggi debit sungai yang relatif hanya menunjukkan angka berapa ketinggian air sungai tersebut.

A.2 Saat terjadi bencana (darurat bencana)

1. Daya Tanggap

Respon terhadap bencana

Pada tahap ini terdapat langkah-langkah yang harus segera dilakukan agar kejadian bencana banjir yang terjadi tidak menimbulkan korban jiwa ataupun kerugian yang besar. Hal tersebut dapat dilihat dari daya tanggap Bidang II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam mengatasi keadaan darurat bencana banjir di lokasi. Sesuai dengan logo BPBD yang bergambar Segitiga, dimana artinya adalah terdapat tiga pilar utama dalam penanggulangan bencana yaitu pemerintah, swasta dan masyarakat. Dalam pemerintah sendiri tidak hanya Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang saja yang mempunyai peran pada saat darurat bencana banjir terjadi, melainkan

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya pun juga mempunyai kewajiban yang sama pada saat penanganan kedaruratan bencana, namun BPBD di sini tugasnya adalah sebagai komando, pelaksana, dan koordinator.

Ketika bencana banjir terjadi Bidang II Kedaruratan dan Logistik meresponnya dengan langkah-langkah yang sekiranya diperlukan pada saat itu juga. Sehingga penanggulangan bencana banjir oleh BPBD ketika bencana itu terjadi adalah sifatnya fleksibel. Ketika ada laporan bencana banjir terjadi di suatu tempat, maka Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang segera bergerak mengirim personil ke lokasi kejadian untuk memastikan informasi tersebut, lalu melakukan tindakan selanjutnya. Namun ketika survei ke lokasi terjadinya bencana banjir tersebut, personil Badan Penanggulangan Bencana (BPBD) Kota Semarang sudah siap dengan segala peralatan yang dimiliki, seperti mobil Ranger, perahu karet, pelampung, HT, dan lainnya. Tidak adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Kepala BNPB No. 9 tahun 2008 tentang Prosedur Tim Reaksi Cepat, bahwa

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang tidak menerapkannya ke dalam pembuatan Standar Operasional Prosedur kedaruratan bencana banjir. Sehingga sampai saat ini BPBD dalam pelaksanaan kedaruratan bencana banjir di Semarang masih menggunakan metode yang sederhana, yaitu fleksibilitas, artinya bahwa apa yang perlu dilakukan maka akan dilakukan.

Berdasarkan penjelasan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa manajemen bencana Bidang II Kedaruratan dan Logistik dalam menghadapi saat terjadi bencana banjir masih bersifat fleksibel dan tidak ada Standar Operasional Prosedur yang dijalankan karena memang tidak dibuat oleh Bidang II tersebut.

Pemberian logistik

Selain melakukan tindakan kedaruratan pada saat terjadi bencana banjir di lokasi, Bidang II Kedaruratan dan Logistik Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang juga melakukan kegiatan penunjang dari kedaruratan tadi, yaitu dengan cara pemberian logistik kepada korban bencana banjir. Pemberian logistik kepada korban

bencana banjir tersebut bertujuan agar korban banjir yang berada di lokasi dapat mengungsi dengan tetap mendapatkan pasokan kebutuhan sehari-hari yang normal.

Pemberian logistik pada korban bencana banjir oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang harus dengan syarat yang harus dipenuhi. Setelah pihak dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang survei ke lokasi banjir, maka yang menentukan apakah akan diberi bantuan logistik atau tidak adalah bahwa kondisi tinggi genangan banjir, lalu apakah para warga masyarakat di lokasi tersebut harus mengungsi atau tidak. Apabila ketinggian banjir di lokasi tersebut sudah berada pada fase membahayakan bagi warga, maka warga akan diungsikan ke tempat yang lebih aman.

Korban bencana yang menjadi pengungsi tersebut pastinya tidak bisa berkegiatan sehari-hari, maka dari sinilah Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang memberikan bantuan logistik, yang dapat berupa makanan dan air minum, tenda darurat untuk mengungsi, dan lain

sebagainya. Pemberian logistik tersebut oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sangatlah terbatas, apabila warga masyarakat yang terkena banjir tidak terlalu parah, maka tidak diberi logistik oleh BPBD.

A.3 Pasca Bencana

Tahapan manajemen bencana yang selanjutnya adalah tahap pasca bencana. Setelah bencana terjadi dan proses tanggap darurat sudah dilewati, maka langkah selanjutnya adalah melakukan rehabilitasi dan rekonstruksi. Tahap pasca bencana banjir dilaksanakan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang.

Rehabilitasi dan rekonstruksi

Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah pasca bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana (Soehatman Ramli: 38). Dalam rehabilitasi yang dilakukan oleh

Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang meliputi kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memperbaiki dan memulihkan kondisi para korban bencana banjir.

Upaya rehabilitasi yang dilakukan oleh Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi ada beragam sektor yang harus dicapai. Pemulihan sektor-sektor tersebut adalah sebagai berikut:

- 1) sektor kesehatan
- 2) sektor rekonsiliasi dan resolusi konflik
- 3) sektor pemulihan sosial ekonomi masyarakat
- 4) sektor keamanan dan ketertiban
- 5) sektor fungsi pemerintahan dan fungsi pelayanan publik

A. Bantuan sosial

Program Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang selanjutnya adalah dengan cara pemberian bantuan sosial. Bantuan sosial yang diberikan bukan menjadi tanggung jawab Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sepenuhnya, namun mereka hanya mempunyai kewenangan sebagai koordinasi, komando dan pelaksana.

Dalam hal pemberian bantuan sosial ini tugas dari Bidang III Rehabilitasi dan Rekonstruksi adalah melihat dan memastikan siap saja yang berhak untuk dapat diberi bantuan sosial.

Bantuan sosial yang diberikan oleh Pemerintah Kota Semarang adalah bantuan kepada korban bencana meninggal dunia, korban luka dan perlu dirawat di rumah sakit, korban bencana yang rumah/tempat usaha/kios/los mengalami kerusakan. Hanya tiga (3) jenis akibat yang dapat diberi bantuan sosial.

Pembiayaan

Anggaran yang ada dikelola oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang tidak dapat dikelompokkan ke dalam sub prioritas bencana tertentu, seperti bencana banjir. Artinya adalah, bahwa anggaran yang ada itu untuk mencakup seluruh kegiatan dan penanggulangan bencana apapun, baik bencana banjir, tanah longsor, puting beliung, kekeringan, dan lain sebagainya. Anggaran untuk penanggulangan bencana banjir masuk ke dalam program dan kegiatan yang direncanakan oleh masing-masing bidang yaitu Bidang I, Bidang II, dan

Bidang III yang dimana program penanggulangan banjir dilakukan. Karena keterbatasan anggaran untuk penanggulangan bencana banjir, maka BPBD Kota Semarang berkoordinasi dengan pihak-pihak luar yang ingin bekerja sama untuk penanggulangan banjir dengan memberikan bantuan berupa materi atau tenaga

Pengawasan

Sistem pengawasan yang dilakukan di Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang ada dua jenis, yaitu pengawasan secara langsung dan juga pengawasan tidak langsung. Untuk pengawasan secara langsung dilakukan secara hierarki, maksudnya adalah pengawasan yang dilakukan dari atasan kepada bawahannya. Dari kepala BPBD Kota Semarang hingga yang berada paling bawah yaitu pegawai staf. Pengawasan dilihat dari berbagai aspek, mulai dari kedisiplinan, kinerja dan lain sebagainya. Pengawasan tidak langsung yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang adalah dengan membuat laporan kinerja setiap setahun sekali, sehingga dapat dilihat kinerja yang dicapai oleh BPBD, apakah sesuai

dengan rencana atau tidak. Pelaksanaan pengawasan selama ini berdasarkan penelitian sudah dilaksanakan dengan baik, artinya tidak ada kendala yang berarti.

Faktor penghambat

Faktor penghambat atau kendala yang dihadapi oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir di Semarang yaitu sebagai berikut, pola pikir (*mindset*) masyarakat dan juga pemangku kepentingan yang masih belum satu pikiran dengan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, yaitu masih rendahnya kesadaran akan pentingnya penanggulangan bencana banjir. Selain itu faktor penghambat lainnya yaitu bahwa belum terdapatnya Standar operasional pada tahapan bencana dalam melakukan manajemen bencana yang dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang. Selanjutnya yaitu keterbatasan logistik yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sehingga menyebabkan pemberian bantuan

bencana saat keadaan darurat bencana terjadi. Faktor penghambat selanjutnya adalah kurangnya personil yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, sehingga penanggulangan bencana banjir dirasa kurang maksimal. Yang kelima adalah data informasi yang kurang akurat yang didapat dari lapangan, hal ini menyebabkan Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang sulit untuk menentukan program ataupun kegiatan yang akan di lakukan di masa mendatang mengenai penanggulangan bencana banjir. Faktor penghambat yang terakhir adalah keterbatasan dana yang dimiliki oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang, hal ini dapat dilihat dari program rehabilitasi sektor sosial ekonomi budaya yang dirasa kurang tepat tujuannya, dan juga pada bidang II yang memiliki keterbatasan logistik dan peralatan untuk kedaruratan bencana banjir.

Faktor Pendukung

Faktor yang mendukung dalam manajemen bencana oleh Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang yang pertama

adalah banyaknya dukungan yang diberikan oleh berbagai pihak luar BPBD, seperti Organisasi Masyarakat, Komunitas Masyarakat, Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait, hingga relawan-relawan yang terbentuk dari Kelurahan Siaga Bencana / Kelurahan Tangguh Bencana. Kemudian faktor pendukung yang kedua adalah keaktifan tenaga relawan pada KSB/KTB yang membantu BPBD Kota Semarang dalam menanggulangi bencana banjir, dikarenakan personel BPBD yang sangat terbatas sehingga hal ini sangatlah membantu dari proses manajemen bencana yang dilakukan BPBD. Kemudian faktor pendukung yang ketiga adalah, terjalannya koordinasi yang baik antara Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) dengan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait dengan manajemen bencana. Baiknya koordinasi ini membuat manajemen bencana yang dikomando oleh BPBD menjadi lancar dan bekerja sesuai dengan tugas masing-masing dalam menanggulangi bencana banjir di Semarang.

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan penjelasan pada di atas, kesimpulan yang dapat diambil dari manajemen bencana oleh BPBD dalam menanggulangi bencana banjir di Kota Semarang adalah dengan melaksanakan tahapan-tahapan manajemen bencana, yaitu:

1. Perencanaan

A. Pasca Bencana, pada tahap ini proses yang dilakukan oleh BPBD yakni terdiri dari mitigasi, kesiapsiagaan, dan peringatan dini dimana menghasilkan program seperti pembentukan KSB, pembuatan peta risiko/rawan bencana, dan juga rencana kontijensi.

2. Pengorganisasian dan Penggerakan

Saat darurat bencana, pada tahapan ini BPBD melakukan tanggap darurat bencana, dan juga pemberian logistik kepada korban banjir

Pasca bencana, pada tahapan ini BPBD melakukan kegiatan yakni rehabilitasi dan rekonstruksi yang dimana rehabilitasi dan rekonstruksi tersebut sudah dibagi masing-masing wewenangnya.

3. Pembiayaan

Tidak adanya pengkhususan dana anggaran untuk penanggulangan bencana banjir, sehingga penanggulangan banjir belum optimal.

4. Pengawasan

Pengawasan terhadap pegawai BPBD dalam pelaksanaan manajemen bencana dalam penanggulngn banjir sudah baik, sehingga perlu dipertahankan.

5. Faktor Penghambat

Faktor penghambat

6. Faktor Pendukung

B. Saran

1. Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Semarang harus membuat Standar Operasional Prosedur (SOP) pada setiap tahapan manajemen bencana, dan juga segera untuk dapat menyelesaikan dokumen rencana kontijensi;
2. Memaksimalkan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat;
3. Memaksimalkan Kelurahan Siaga Bencana dan Kelurahan Tangguh Bencana dan juga pihak-pihak terkait lainnya seperti OPD dan juga pihak swasta yang dapat digunakan sebagai

personil tambahan dalam penanggulangan bencana banjir.

DAFTAR PUSTAKA

Darmadi, Damai. Sukidin. (2009). *Administrasi Publik*. LaksBang PRESSindo.

Thoha, Miftah. 2008. *Ilmu Administrasi Publik Kontemporer*. Jakarta: Prenada Media Grup.

Pasolong, Harbani. (2007). *Teori Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.

Tangkilisan, Hessel Nogi S. 2005. *Manajemen Publik*. Jakarta: PT Grasindo.

Ramli, Soehatman. 2010. *Pedoman Praktis Manajemen Bencana*. Jakarta: Dian Rakyat.

Kusumasri, Bevola. 2014. *Manajemen Bencana dan Kapabilitas Pemerintah Lokal*. Yogyakarta: Gava Media.

Handoko, T. Hani. 2008. *Manajemen*. Yogyakarta: BPF.

Athoilah, Anton. 2010. *Dasar-Dasar Manejemen*. Bandung: CV Pustaka Setia

Nurjanah, dkk. 2012. *Manajemen Bencana*. Bandung: Alfabeta.

Keban, T Yeremias. 2008. *Enam Dimensi Administrasi Publik*. Yogyakarta: Gava Media.

Sugiyono. 2009. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Bandung : Alfabeta.